

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DAGHO, KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE**

Asia*, Dolfie Kaligis*, Heru Santoso*, M. Zainul Arifin*, Yuli Purwanto*.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Jl. Tandurusa, Po Bok 12 BTG/Bitung Sulawesi Utara

Abstract

Since 1980 there have been several studies on fisherman households in the coastal area of north sulawesi. The results indicate that fishing households whose jobs are solely dependent on catching fish earn income that is only able to meet their daily needs, and if any money is left, it is usually used for school fees for children, buying clothes, and repairing their dwellings .

The purpose of this study are: (1). To know the type of work of the coastal community of Dagho village, (2). To study the economic condition of coastal communities of Dagho village.

the study was conducted from July 2017 to November 2017. The research location is in the village of Tamako, dagho, Sangihe islands. Sources of data were obtained from the villagers of Dagho and the head office of the Dagho village. Primary data: documentation, amount of income, number of family members, and level of education. Secondary data: the type of work of the dagho villagers, the head of the dagho family,

The data acquisition instrument uses: Interview: social condition data by key informen (government figure and religious leader), Questionnaire: amount of income, number of family member, and education level, Documentation: residence (house)

The data analysis uses descriptions to describe the socio-cultural conditions and economic conditions of the Dagho villagers.

From the research in get the conclusion: (1). Type of work of coastal community of Dagho village is gardening and farming each above 200 KK and the lowest kind of work is fisherman as big as 50KK, (2). Economic condition of coastal community of Dagho village with pre-prosperous category above 350 households, medium category 200 households, poor category 150 households, 60 households of prosperous category, and rich category of 10 families.

keywords : Dagho, Social economic, coastal society.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, social, keamanan dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (Km²), yang terdiri dari 2,3 juta Km² perairan kepulauan, 0,8 Km² perairan territorial, dan 2,7 Km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat archipelagic, yang terdiri dari 17.504 pulau, menjadi sangat penting dalam

system perdagangan dan penyedia bahan baku bagi masyarakat nasional dan internasional (Apridar, 2011).

Lebih lanjut dikemukakan bahwa selain letak wilayah kepulauan tersebut sangat memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian yang didasarkan pada basis sumberdaya kelautan dan perikanan. Lautan dapat berperan juga sebagai media pemersatu bangsa yang membentuk satu kesatuan pertahanan keamanan, politik, dan social. Di samping itu pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan beserta habitat-habitat di dalamnya merupakan wilayah

yang menyediakan sumberdaya kelautan dan perikanan yang menjadi modal dasar pembangunan ekonomi nasional.

Sejak tahun 1980 sejumlah penelitian tentang kehidupan sosial ekonomi rumahtangga nelayan telah dilakukan di desa pesisir Sulawesi Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa rumahtangga nelayan yang pekerjaannya semata-mata tergantung pada usaha menangkap ikan memperoleh pendapatan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan jika ada uang yang tersisa, itu biasanya digunakan untuk biaya sekolah anak, membeli pakaian, dan memperbaiki tempat tinggalnya. Temuan studi pada berbagai komunitas nelayan di luar negeri menunjukkan bahwa organisasi social ekonomi maupun lembaga terkait lainnya yang ada di desa pesisir memegang peranan penting dalam perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir. Dengan kata lain bahwa organisasi sosial ekonomi bisa menjadi penunjang dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Tanpa organisasi social ekonomi, nelayan akan bekerja dan hidup sendirian tanpa ada yang memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka (Mantjoro dalam wasak 2012).

Desa Dagho berada di kecamatan Tamako kepulauan Sangihe propinsi Sulawesi Utara. Penduduk desa Dagho memiliki jenis pekerjaan yang bervariasi antara lain sebagai petani, perkebunan, nelayan, hal tersebut disebabkan kondisi sumberdaya alam yang relatif mendukung baik sumberdaya alam yang ada di darat maupun sumberdaya alam laut.

Sebelum tahun 2000 jumlah nelayan di desa Dagho hampir 50 persen kepala keluarga berprofesi sebagai nelayan. Tahun 2014 jumlah nelayan di desa Dagho hanya berjumlah 8 kepala keluarga. Untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Dagho dilakukan penelitian ini.

Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa jenis pekerjaan masyarakat pesisir desa Dagho?
2. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Dagho ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jenis pekerjaan masyarakat pesisir desa Dagho.
2. Untuk mengkaji kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Dagho.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan perikanan di Indonesia. Secara spesifik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Pengembangan ilmu dan teknologi
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi lain dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2. Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan social ekonomi masyarakat pesisir.
3. Masyarakat Nelayan
Manfaat bagi nelayan diharapkan dengan penelitian ini pemerintah khususnya pemerintah di kepulauan Sangihe dapat memberikan kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di desa Dagho.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Masyarakat Pesisir

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan

dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal (Supriatna, 1997).

Menurut Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel *"Poverty and Human Development"* mengatakan bahwa: *"The case for human development is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves"* (pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).

Sedangkan Booth dan Me Cawley (Dalam Moeljarto T., 1993) menyatakan bahwa "di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan".

Kadji (2010) Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (*gepeng*), dan pengangguran. Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya. Pada umumnya, penduduk yang tergolong miskin adalah "golongan residual", yakni

kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus, seperti melalui IDT, namun secara umum sudah melalui PKT, Program Bimas, Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan, NKKBS, KUD, PKK didesa.dsb. Golongan ini termasuk sulit disentuh, karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi. Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan dasar manusia, dan perlindungan hukum atau perundang-undangan yang tidak kurang memihak mereka.

B. Jenis – Jenis Kemiskinan

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Lincoln Arshad, 1999), secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita".

Kenyataannya, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998:26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Ketika negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan pengecualian Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari media (rata-rata) pendapatan. Ketika median/ rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama (BPS, 2009;12-16).

b. Kemiskinan Absolut

Ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum

diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilainya dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan/ pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut tetap (tidak berubah) dalam hal standar hidup sehingga garis kemiskinan absolut dapat membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang ingin menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding anatar satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.

World Bank menghitung garis kemiskinan absolut dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam PPP (*Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli*). Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. (BPS,2009:15).

Pendapatan perkapita yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar. Hal ini mengingat besar atau kecilnya porsi atau bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok- kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama untuk masing-masing negara, sehingga mungkin saja suatu negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru mempunyai persentase penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan internasional yang lebih besar dibandingkan dengan suatu negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain struktur pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara yang bersangkutan, berbagai pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam prakteknya ikut menentukan pola-pola distribusi pendapatan nasional.

c. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Soetandyo Wignjosebroto dalam "Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan". Dikatakan tidak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Dengan kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/ atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di

Pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya.

Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing seperti halnya suku Badui di Cebeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan". Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak didalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Seringkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu "sudah takdir", dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh sebab itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya "Gerakan Membudayakan Keberdayaan" pada lapisan masyarakat bawah. Melek

huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Juli 2017 hingga tanggal November 2017. Lokasi penelitian di desa dagho kecamatan Tamako, kabupaten Sangihe.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data diperoleh dari masyarakat desa Dagho dan kantor kepala desa Dagho. Jenis data pada penelitian ini berupa :

1. Data primer : dokumentasi, jumlah penghasilan , jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan.
2. Data sekunder : jenis pekerjaan masyarakat desa dagho, jumlah kepala keluarga masyarakat dagho,

Sedangkan instrument pengambilan data menggunakan :

1. Wawancara : data kondisi sosial oleh key informen (tokoh pemerintahan dan tokoh agama)
2. Kuisioner : jumlah penghasilan , jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan.
3. Dokumentasi : tempat tinggal (rumah)

Analisis Data

Analisis data menggunakan deskripsi untuk menggambarkan kondisi sosial budaya dan kondisi ekonomi masyarakat desa Dagho.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Dagho kecamatan Tamako, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : TabukanTengah

Selatan : Laut

Barat : Kampung Kokema Barat

Timur : Kampung Kaliwatu

Luas bentangan lahan (rata – rata) datar 27,60 Ha, ketinggian di atas permukaan laut (rata – rata) 17 m.

A. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Dagho

1. Asal Usul Nama Dagho

Kampung Dagho dulunya PENDARAHONG Mendaho) artinya budaya pendarahang/pekakelungan (tempat berteduhan baik diwaktu hujan dan panas dan diwaktu badai) dan menjadi pusat pusat berbekalan Laine,Dagho dan Kaluwatu dan pengaturan strategi perang. Kawasan Pendarahang (Dagho) meliputi :

- a. Pananaluang sekarang kampung Pananaro
- b. Mahamu/Batu sekarang kampung Mahumu
- c. Makaliku sekarang Kampung Makalekuhe
- d. Dedah sekarang kampong Bebu
- e. Pangalalamang sekarang kampong Kalama Barat

Demikian asal usul desa Dagho yang sekarang sudah menjadi sebuah desa yang teduh dan memiliki potensi kekayaan baik sumberdaya alam di darat maupun sumberdaya alam laut.

2. Agama

Agama yang di anut oleh masyarkat Dagho seratus persen Kristen.

3. Kearifan Masyarakat Dagho

Setiap kebijakan pemerintah Desa Dagho yang berhubungan dengan masyarakat pengambilan kebijakan berdasarkan hasil kesepakatan dari tokoh – tokoh agama, tokoh – tokoh masyarakat, dan MTK.

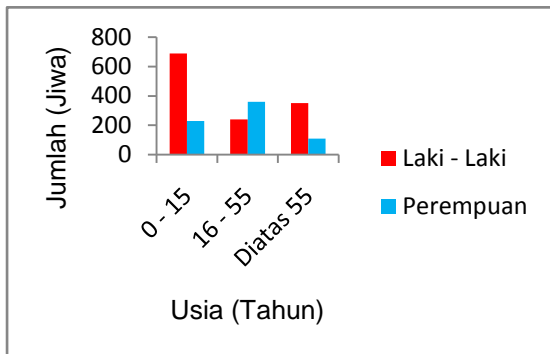
Program kampung diawali dari masyarakat kampong yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat,

tokoh agama, pemerintah kampung beserta MTK dalam rangka penggalian gagasan. Berdasarkan penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di kampung dandiperlukan oleh masyarakat sehingga dapat tertampung aspirasi masyarakat.

Sebagai wakil dari masyarakat MTK berperan aktif membantu pemuka kampung dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah kampung beserta MTK memutuskan program pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam artian menyusun skala prioritas.

4. Kondisi Usia Masyarakat Desa Dagho

Berdasarkan data jumlah laki – laki 1279 jiwa sedangkan wanita berjumlah 696 jiwa. Untuk mendapatkan gambaran perbandingan usia masing – masing antara laki – laki wanita dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

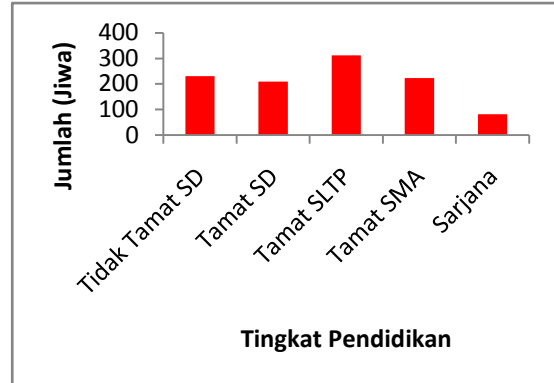


Gambar 1 : Usia masyarakat Dagho Tahun 2016

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan usia 0 -15 tahun didominasi oleh laki –laki, sedangkan usia 16 - 55 tahun didominasi oleh perempuan sedangkan umur diatas 55 tahun didominasi oleh laki – laki.

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Dagho

Berdasarkan data bahwa tingkat pendidikan masyarakat Dagho bervariasi ada yang tamat SD, ada yang tamat SLTP, ada yang tamat SMA, bahkan ada yang sarjana.

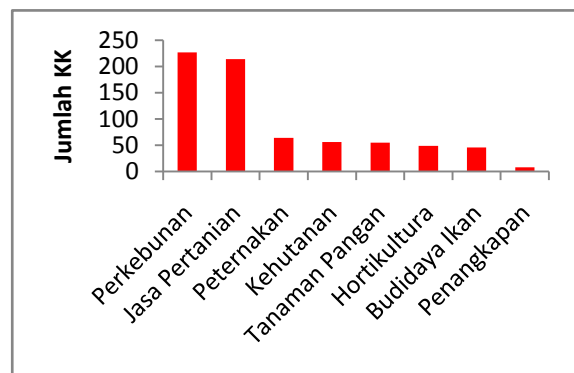


Gambar 2. Tingkat pendidikan masyarakat Dagho, 2016

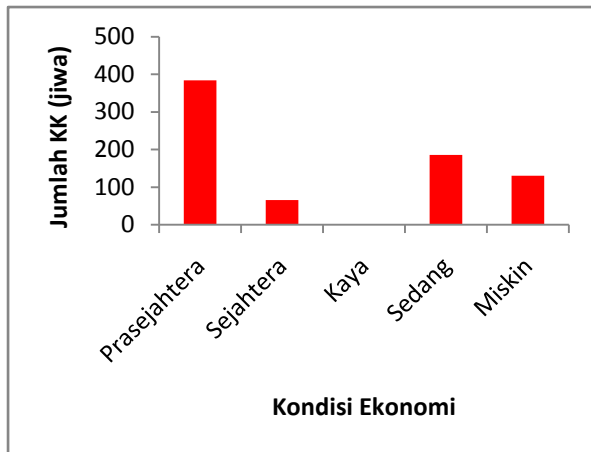
Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan masyarakat Dagho kebanyakan tamat SLTP sebesar 314 jiwa atau 29,5 persen, disusul oleh masyarakat tidak tamat SD sebesar 21,9 persen selanjutnya tamat SMA sebesar 21,1 persen selebihnya sarjana.

B. Kondisi Masyarakat Desa Dagho

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa matapecaharian masyarakat Dagho didominasi perkebunan, selanjutnya menyusul jasa pertanian. Sedangkan jumlah masyarakat yang matapecaharian penangkapan/nelayan merupakan yang paling rendah.



gambar 3. Mata pecaharian masyarakat Dagho, 2016



Gambar 4. Kondisi ekonomi masyarakat Dagho, 2016

Berdasarkan gambar 4 di atas menunjukkan kondisi masyarakat kategori prasejahtera di atas 350 KK, kategori sedang sebesar 200 KK, kategori miskin 150 KK, kategori sejahtera 60 KK, dan kategori kaya sebesar 10 KK.

Kondisi ekonomi masyarakat dagho menggunakan 8 variabel kriteria tingkat kesejahteraan menurut BPS, 2000 sebagai berikut :

1. Luas lantai perkapita
2. Jenis lantai
3. Air minum/ketersediaan air minum
4. Jenis jamban/wc
5. Kepemilikan asset
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk dimakan)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, telur, ayam, dan ikan)

Kedelapan variabel di atas yang dijadikan indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dagho.

KESIMPULAN

1. Jenis pekerjaan masyarakat pesisir desa Dagho adalah berkebun dan bertani masing-masing di atas 200 KK dan jenis pekerjaan yang terendah adalah nelayan sebesar dibawah 50 KK.
2. Kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Dagho kategori prasejahtera di atas 350 KK, kategori sedang 200 KK, kategori miskin 150 KK, kategori sejahtera 60 KK, dan kategori kaya 10 KK.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridar, Karim M, Suhana. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Kadji Yulianto. 2010. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Jurnal
- Moeljarto, (1995). *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, PT. Tiara Wacana : Yogyakarta.
- Wasak Martha. 2012. *Keadaan Sosial – Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan. Kecamatan Likupanh Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara*. Pacific Journal. Januari 2012 Vol. 1 (7): 1339 - 1342. ISSN 1907 – 9672

- Dosen Politeknik KP Bitung